

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut PP 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan pertanggung jawaban APBN/APBD sesuai dengan pasal 56 ayat 4 UU no 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan juga menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomo 60 tahun 2008 penerapan SPIP bersifat wajib.

Implementasi SPIP di pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat dibilang cukup muda jika ditinjau dari penerapan SPIP pada aturan Peraturan Bupati (PERBUP) Sukabumi nomor 27 tahun 2013. Hasil yang didapat dari penerapan SPIP yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi adalah didaptkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dua tahun berturut-turut terhitung pada tahun 2014-2015 (IHPS BPK, 2016), akan tetapi penerapan SPIP di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya dikatakan sukses, menurut Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) yang dirilis oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 menyatakan bahwa masih adanya kendala-kendala yang terjadi seperti belum meratanya kompetensi pegawai aparatur sipil negara, minimnya rasio pengawas internal pemerintah, dan belum optimalnya penerapan teknologi

informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (RPJMD Kab Sukabumi, 2016).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi segala aspek baik proses bisnis, transaksi, organisasi, hingga kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi menjadi sebuah alat bagi manajemen dalam mengumpulkan informasi, mengelola bisnis, dan membuat keputusan berharga bagi kelangsungan organisasi. Teknologi informasi tidak lepas kaitannya dengan sistem informasi, dengan dukungan sistem informasi yang baik, teknologi informasi yang digunakan sudah barang tentu akan membuat informasi yang dibutuhkan menjadi lebih efektif, efisien serta ekonomis (Firdaus dan Suryo, 2012). Penggunaan teknologi informasi pun tak luput dari segala jenis sektor termasuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, membuat provinsi serta kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur pemerintahan pada masing-masing daerah, hingga pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pengelolaan tersebut baik pemerintahan maupun keuangan, tercakup dalam area khusus yang dibina oleh pemerintah seperti perumahan, pelabuhan, perkebunan, badan otoritas, pertambangan, perhutanan, perkotaan, kawasan wisata dan lain sebagainya (Rinaldi, 2012). Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi informasi guna membantu mengelola keuangan yang ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku pelaksana otonom sudah sewajarnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, transparan, dan akuntabel sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah memiliki kualitas yang dampaknya secara langsung ada pada penyampaian pelaporan keuangan pada publik, dimana laporan

keuangan tersebut harus bersifat andal, relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, serta mudah dipahami bagi pengguna informasi keuangan pemerintah. Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah didukung oleh PP No. 56 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang menyatakan bahwa sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Dalam menilai sebuah sistem informasi dibutuhkan sebuah instrument yang digunakan untuk menilai bagaimana sistem itu digunakan. Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel yang diambil dari DeLone dan McLean (1992) yaitu kualitas sistem, kualitas informasi dan kepuasan pengguna.

Kepuasan pengguna merupakan sebuah dimensi penilaian dalam menilai kesuksesan sistem informasi. Menggunakan kepuasan pengguna sebagai parameter penilaian kesuksesan akan sangat membantu ketika penggunaan sistem informasi tersebut tidak dinilai dari intensitas penggunaan sistem (Urbach & Müller, 2011), hal tersebut sesuai dengan model yang dibuat dan diuji oleh DeLone & McLean (1992) yang menyatakan bahwa kesuksesan implementasi sistem dapat dilakukan dengan menggunakan parameter kepuasan pengguna sebagai acuan kesuksesan sebuah sistem. Dalam praktiknya pada SIKD, penerapan SIKD di Indonesia belum sepenuhnya memuaskan jika ditinjau dari aparat pemerintah yang telah menggunakan paket aplikasi tersebut, hal ini ditunjukkan oleh jurnal yang dirilis oleh DJPK yang berpendapat bahwa dalam implementasi SIKD, aparat pemerintah merasa kebingungan akan acuan yang digunakan, interpretasi yang berbeda-beda terhadap laporan yang dihasilkan, yang dampaknya pelanggaran kewajiban atau kewenangan oleh aparat pemerintah daerah akibat perbedaan aturan yang digunakan oleh pemerintah daerah tidak terhindarkan (budiriyanto,2013). Penelitian yang menyatakan bahwa pentingnya kepuasan pengguna dalam menilai kesuksesan sebuah sistem diutarakan oleh Iivari, (2005) kepuasan pengguna dapat

digunakan sebagai parameter dalam menilai kesuksesan implementasi sistem pada sektor publik dan hal ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdel Nasser H. Zaid (2012) yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kesuksesan sebuah sistem informasi.

Kualitas sistem merupakan sebuah dimensi karakteristik yang diinginkan dari sebuah sistem informasi, dan juga mempengaruhi sistem informasi itu sendiri. Penilaian kualitas sistem sendiri berfokus pada aspek kegunaan dan karakteristik pemakaian sistem pada penilaian sebuah sistem (Urbach dan Müller, 2011). Terkait dengan penilaian kepuasan pengguna maka kualitas sistem dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dipakai (DeLone & McLean, 1992). SIKD yang dibuat diharapkan dapat mempermudah pekerjaan aparat pemerintah sehingga dalam pembuatan aplikasinya SIKD diintegrasikan langsung kepada DEPDAGRI yang tujuannya digunakan untuk integrasi informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Budiriyanto, 2013). Dalam penerapan SIKD pemerintah, pemerintah wajib untuk menggunakan SIKD seperti yang tercantum dalam PP no 55 tahun 2015 serta PERMENDAGRI No 13 tahun 2006. Namun dalam praktiknya dari jumlah 524 pemda yang berada di Indonesia, sebanyak 361 atau 68,89% pemda telah menggunakan sistem informasi keuangan, dan 163 pemda atau 31,11%, belum diketahui secara pasti sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, selain itu pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh pemda juga masih tidak seragam. Sebanyak 223 pemda menggunakan SIMDA, 68 pemda menggunakan SIKD, 123 pemda menggunakan sistem lain, dan 110 pemda tidak menggunakan sistem informasi (Halim, A, Jaya, Wihana, dan Azis, Nasir, 2012). Keberagaman sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang ada, terjadi karena penerapan suatu sistem atas suatu peraturan yang berlaku juga berbeda-beda dan tidak selaras, hal ini menyebabkan kesulitan pengkoordinasian antara laporan keuangan pusat dengan laporan keuangan daerah dikarenakan adanya disharmonisasi dan inkonsistensi aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah (Budiriyanto, 2013). Selain itu dalam praktiknya,

faktor manusia menjadi permasalahan dalam sistem yang digunakan, BPK (2015) dalam jurnalnya menyatakan bahwa.

1. (81,65%) pemda tidak merencanakan kebutuhan kompetensi untuk tugas dan fungsi pengelola keuangan, aset dan TI serta Inspektorat selaku pereviu LKPD.
2. Penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI tidak sesuai dengan bidangnya. Sebanyak 85 (77,98%) pemda melakukan penempatan pegawai pengelola keuangan, aset dan TI tanpa mempertimbangkan tugas, fungsi dan kompetensi sebagai pengelola keuangan, aset dan TI.
3. Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai. Sebanyak 81 pemda (74,31%) tidak merencanakan kebutuhan pelatihan SDM, sehingga sebagian pelatihan yang dilaksanakan oleh pemda tidak bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan, aset dan TI, serta Inspektorat selaku pereviu LKPD.

Sehingga dari hal ini terlihat jelas bahwa kepuasan pengguna terhadap SIKD belum memuaskan jika dikaitkan dengan sistem yang dibangun, hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan acuan yang digunakan oleh tiap pemerintah daerah (Budiriyanto, 2013) serta faktor manusia yang belum siap menggunakan paket aplikasi tersebut (BPK, 2015). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (Iivari, 2005), hal ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Zaied, 2012) bahwa kualitas sistem memiliki korelasi positif dengan kepuasan pengguna, dengan mempertimbangkan bahwa faktor dukungan manajemen sebagai komponen yang dapat meningkatkan kualitas sistem yang digunakan pada sektor publik. Beberapa penelitian yang dilakukan pada sektor publik atau pemerintah mengenai SIKD yang dilakukan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2011), (Arifin & Pratolo, 2012), dan (Nursudi, 2014) menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIKD, akan tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh (Mulyono, 2009), , (Tan & Aliyah, 2015) dan (Wartini & Yasa, 2016) yang menyatakan bahwa kualitas sistem secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIKD.

Kualitas informasi merupakan sebuah karakteristik output sistem informasi. Sebuah contoh yang dapat digunakan oleh pengguna atau karyawan dengan menggunakan sistem informasi adalah statistik penjualan dengan harga terkini yang dapat diraih secara *up to date* (Urbach & Müller, 2011). Adapun penelitian berkaitan dengan kualitas informasi pada sektor publik telah dilakukan di Finlandia dan menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh pada kepuasan pengguna sehingga berdampak pada individu yang pada akhirnya kinerja pengguna aplikasi diharapkan meningkat, selain itu baik kualitas sistem dan kualitas informasi dapat digunakan sebagai parameter yang efektif dalam *framework* model Delone dan Mclean dalam menilai kepuasan dan ketidakpuasan pengguna (Iivari, 2005). Beberapa penelitian yang dilakukan pada sektor publik atau pemerintah mengenai SIKD yang dilakukan di Indonesia seperti yang dilakukan (Wahyuni, 2011), dan (Nursudi, 2014) menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SIKD, akan tetapi terdapat perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mulyono & Malang, 2009), (Tan & Aliyah, 2015), dan (Wartini & Yasa, 2016). Wartini dan Yasa (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIKD, dan kepuasan pengguna hanya mengintervening secara parsial antara kualitas sistem dengan kualitas informasi, jika kualitas sistem yang digunakan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, maka kualitas informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem akibat kepuasan pengguna yang meningkat akan berdampak pada keuntungan organisasi yang meningkat.

Dengan fenomena tersebut dan adanya inkonsistensi penelitian terdahulu, membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Sehingga judul penelitian penulis yaitu **“Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi”**.

1.3 Perumusan Masalah

Terkait perubahan regulasi penggunaan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010, maka secara tidak langsung baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2015. Dampak dari penerapan amanat PP No. 71 tahun 2010 adalah berubahnya SIKD yang digunakan pemerintah sesuai dengan PMK No. 74 tahun 2016 yang menyatakan bahwa adanya perubahan besar pada paket aplikasi sistem yang digunakan oleh pemerintah seperti sistem anggaran terpadu, penerapan akuntansi pemerintah, dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

Penggunaan SIKD atau paket aplikasi sistem pada pemerintah bersifat wajib sesuai dengan PP no 55 tahun 2015 dan PERMENDAGRI No 13 tahun 2006, akan tetapi terdapat pemerintah daerah yang belum menerapkan SIKD sesuai dengan aturan yang dibuat, selain itu dalam penerapan SIKD masih terdapat macam-macam paket aplikasi yang digunakan, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan acuan yang digunakan oleh tiap pemerintah daerah. Masalah lain yang terjadi adalah belum siapnya faktor manusia dalam menggunakan SIKD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, sehingga dari kedua permasalahan tersebut terjadi kesulitan pengkoordinasian antara laporan keuangan pusat dengan laporan keuangan daerah dikarenakan adanya disharmonisasi dan inkonsistensi aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga aparat pemerintah merasa kebingungan akan acuan yang digunakan, interpretasi yang berbeda-beda terhadap laporan yang dihasilkan dan pada akhirnya berimbas pada pelanggaran kewajiban atau kewenangan terhadap aparat pemerintah daerah akibat perbedaan aturan yang digunakan oleh pemerintah daerah tidak terhindarkan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna pada implementasi SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kualitas sistem, kualitas informasi, dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas sistem, kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna pada implementasi SIKD Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kualitas sistem, kualitas informasi, dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, seperti berikut ini:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sistem, dan kualitas informasi, pada kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Menambah wawasan bagi para pembaca tentang penerapan SIKD yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai kesuksesan implementasi SIKD.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menilai kepuasan pengguna terhadap implementasi SIKD yang telah dilakukan.
2. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesuksesan implementasi SIKD yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur kesuksesan implementasi SIKD ditinjau dari kepuasan pengguna dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kualitas sistem (X1), kualitas informasi (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variabel Y adalah kepuasan pengguna.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk melakukan analisis terhadap dua variabel independen (X1, dan X2) dalam mempengaruhi kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk mempermudah penulis membuat pembahasan serta mengantarkan penulis pada kerangka acuan yang sistematis. Urutan penulisan bab tersebut disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa kutipan buku dan jurnal yang telah diteliti sebelumnya berupa teori dan definisi. Bab ini juga menjelaskan variabel yang menjadi fokus penelitian dan hubungan antar variabel, serta lokasi penelitian, objek penelitian, dan periode penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai analisis kesuksesan implementasi SIKD Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penulis untuk penulis selanjutnya dalam meneliti kesuksesan implementasi SIKD baik secara teoritis maupun praktis.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN